

## RINGKASAN

Kemiskinan tingkat nasional, regional, dan global berkembang pesat setiap tahunnya. Kemiskinan di Indonesia mengacu pada ketidakberdayaan dalam memenuhi bahan pokok. Data BPS per Maret 2023 mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Data ini masih relatif cukup jauh dari RPJMN tahun 2020-2024. 9 tahun terakhir presentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menyentuh angka 14,18% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan daerah lain menduduki peringkat ke 6 dengan angka kemiskinan terbesar se provinsi Jawa Tengah. Tugas Bappelitbangda untuk merencanakan kebijakan program dalam pengentasan kemiskinan dan tata kelola data penduduk miskin sangat mempengaruhi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif, dengan sasaran penelitian yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan Bappelitbangda dalam mengintegrasikan data kemiskinan sudah baik. Adanya inovasi berbentuk aplikasi sipakisbangga untuk mengelola dan menyimpan data kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, data kemiskinan sangat diperlukan untuk kesamaan datanya. Untuk membantu program pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan di Purbalingga. Bappelitbangda mendapatkan data dari Kemenko PMK yang masih perlu diolah dengan cara di verifikasi secara mandiri. Setiap bulannya diadakan rapat dengan TKPKD dan dinas lain untuk melaporkan tugas. Dan pastinya adanya rakoor yang dilakukan secara rutin agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dinsos juga membuat alur mekanisme pengusulan DTKS dan bantuan sosial. Untuk mempermudah pendataan masyarakat miskin di Purbalingga.

Kesimpulan dari penelitian adalah tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengintegrasikan data kemiskinan dengan memanfaatkan sipakisbangga dan data P3KE. Namun masih ada kekurangan dalam ketepatan data. Tetapi Bappelitbangda terus berusaha maksimal untuk ketepatan sasaran data penduduk miskin. Dengan cara memprioritaskan masyarakat yang sudah tergolong miskin ekstrem. Bappelitbangda dalam hal tata kelola pemerintah diharapkan bisa lebih baik lagi untuk mengelola data penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kesamaan data. Agar program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga bisa berjalan lebih baik lagi dan bantuan masyarakat miskin bisa tepat sasaran.

**Kata Kunci:** kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik, pengentasan kemiskinan

## SUMMARY

National, regional, and global poverty is growing rapidly every year. Poverty in Indonesia refers to the inability to meet basic necessities. BPS data as of March 2023 recorded that the poor population in Indonesia reached 25.90 million people. This data is still relatively far from the 2020-2024 RPJMN. In the last 9 years, the percentage of poor people in Purbalingga Regency has reached 14.18% in 2024. When compared to other regions, it is ranked 6th with the largest poverty rate in Central Java province. The task of Bappelitbangda to plan program policies in poverty alleviation and poor population data management greatly influences poverty alleviation in Purbalingga Regency.

This study uses a qualitative research method, namely producing descriptive data, with research targets determined through purposive sampling techniques. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation. Analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis method. The results of this study indicate that the governance carried out by Bappelitbangda in integrating poverty data is good. There is an innovation in the form of the Sipakisbangga application to manage and store poverty data in Purbalingga district. The local government involves the community in collecting data on the poor, poverty data is very much needed for data equality. To help the poverty alleviation program and reduce poverty rates in Purbalingga. Bappelitbangda obtains data from the Coordinating Ministry for Human Development and Culture which still needs to be processed by being verified independently. Every month a meeting is held with TKPPKD and other agencies to report tasks. And of course there is a coordination meeting that is carried out routinely so that the programs implemented can run smoothly. The Social Service also creates a mechanism flow for proposing DTKS and social assistance. To facilitate data collection on the poor in Purbalingga.

The conclusion of the study is good governance to integrate poverty data by utilizing sipakisbangga and P3KE data. However, there are still shortcomings in data accuracy. But Bappelitbangda continues to make maximum efforts for the accuracy of poor population data targets. By prioritizing people who are already classified as extremely poor. Bappelitbangda in terms of government governance is expected to be better at managing poor population data in Purbalingga Regency to realize data equality. So that poverty alleviation programs in Purbalingga Regency can run better and assistance to the poor can be right on target.

**Keywords:** poverty, good governance, poverty alleviation